

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk bekerjasama melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah diharapkan mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam menciptakan iklim perekonomian yang sehat melalui langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung.

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia usaha adalah kebijakan dalam bidang perbankan. Kebijakan perbankan menjadi perhatian pemerintah, karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pengembangan usaha. Bank merupakan rekan pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional yang berperan sebagai pemberi kredit kepada masyarakat untuk modal menjalankan usaha.

Peran tersebut sesuai dengan pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pokok bank yaitu menerima simpanan dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan pinjaman kredit kepada pihak-pihak yang memerlukan dana.

Pemberian kredit kepada masyarakat sangat membantu peningkatan perekonomian negara. Masyarakat akan mendapatkan modal untuk pengembangan usaha, seperti pendayagunaan barang atau jasa yang diproduksi, pembelian bahan baku, pembelian mesin-mesin, dan pembiayaan operasional lain. Salah satu jenis kredit yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat khususnya para pengusaha adalah kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pengusaha dan ditujukan untuk keperluan investasi perusahaan seperti pembelian mesin-mesin, pembangunan pabrik, pendirian proyek baru atau perluasan usaha lainnya.

Pemberian kredit investasi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena mengandung risiko yang cukup tinggi. Bank harus melihat kondisi kesehatan keuangan nasabah dan memastikan bahwa nasabah tersebut mampu mengembalikan pinjaman pada waktu dan jumlah yang telah ditetapkan. Risiko yang timbul apabila bank tidak benar-benar memperhatikan kondisi keuangan nasabah adalah kredit macet. Kredit macet terjadi karena tidak tertagihnya sejumlah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Tingkat risiko dalam suatu organisasi dapat dihindari dan diperkecil dengan menerapkan suatu sistem manajemen. Sistem manajemen perusahaan berperan penting dalam hal pengelolaan serta pengendalian seluruh aktivitas perusahaan. Sistem manajemen dalam perusahaan terdiri dari beberapa fungsi yang saling berkaitan satu

dengan yang lain. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.

Salah satu fungsi manajemen yang sangat erat kaitannya dengan risiko dalam organisasi adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah suatu fungsi manajemen yang mengukur dan memastikan suatu aktivitas telah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sehingga dapat memperkecil kemungkinan munculnya risiko. Selain itu, fungsi pengendalian juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian tujuan telah dilakukan serta bagaimana penyimpangan dalam suatu aktivitas dapat terjadi. Fungsi pengendalian dalam organisasi akan membantu manajemen dalam mengambil suatu tindakan terhadap risiko yang terdeteksi.

Perusahaan-perusahaan besar sangat membutuhkan fungsi pengendalian yang baik. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin kompleks pula aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Manajemen tidak akan mampu mengendalikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perusahaan secara langsung. Alat yang dapat memudahkan manajemen dalam mengendalikan operasi perusahaan tanpa harus terjun secara langsung disebut dengan pengendalian internal perusahaan. Pengendalian internal merupakan suatu fungsi independen perusahaan yang berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap aktivitas perusahaan.

Pengendalian internal memiliki keterbatasan, seperti kelalaian manusia dalam melaksanakan prosedur dan persekongkolan. Pengendalian internal perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan audit internal dalam perusahaan. Audit internal

merupakan suatu mekanisme kerja dalam menunjang terciptanya pengendalian internal yang efektif demi pencapaian tujuan umum perusahaan. Audit internal mengawasi setiap aktivitas perusahaan agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Pengendalian internal bank ditujukan untuk mengawasi aktivitas pemberian kredit agar aktivitas-aktivitas yang berkaitan dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengawasan aktivitas tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan audit internal perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Audit internal yang baik haruslah melalui beberapa tahapan agar dapat mencapai tujuan pengendalian yang baik. Tahapan-tahapan audit tersebut mencakup tahapan umum, seperti perencanaan audit dan penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan penetapan tindak lanjut atas laporan hasil audit. Perusahaan yang menjalankan tahapan-tahapan audit internal dengan baik diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian perusahaan karena audit internal merupakan suatu alat pengawasan bagi setiap proses kerja yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan pengurangan risiko kerja. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul:

**“PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA BANK JABAR BANTEN (bjb) DI BANDUNG.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Bank harus memiliki pengendalian yang memadai dalam hal pemberian kredit kepada nasabahnya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan pemberian kredit melalui efektivitas pengendalian internal yang diterapkan melalui adanya fungsi audit internal pada bank.

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diidentifikasi dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal yang dilakukan pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung telah efektif?
2. Apakah pengendalian internal atas pemberian kredit pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung telah efektif?
3. Bagaimana peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit investasi pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektivitas audit internal yang telah dilakukan pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung.
2. Mengetahui efektivitas pengendalian internal atas pemberian kredit pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung.

3. Mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian pemberian kredit investasi pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan pada Bank Jabar Banten (bjb) di Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Jabar Banten (bjb):

Memberi gambaran mengenai peranan audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pemberian kredit investasi bank. Selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi manajemen dalam memperbaiki atau meningkatkan kualitas pengendalian internal bank sebagai badan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

2. Bagi pembaca/akademisi/peneliti berikutnya:

Menjadi bahan referensi dan informasi fungsional yang berhubungan dengan kredit investasi pada bank.

3. Bagi penulis:

Memperoleh wawasan baru dalam kaitannya dengan pemanfaatan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah atau pengaplikasian ilmu di lapangan.